

**EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU KELUARGA
SEJAHTERA (KKS) DI DESA PEMATANG SETRAK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

TUGAS AKHIR

Oleh :

ARIFANDI HIDAYAH TANJUNG

2103100047

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **ARIFANDI HIDAYAH TANJUNG**
NPM : 2103100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : 02 Juli 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** (.....)

PENGUJI II : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si** (.....)

PENGUJI III : **Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc.,Prof., Dr. Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : **ARIFANDI HIDAYAH TANJUNG**
NPM : 2103100047
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DI DESA PEMATANG SETRAK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Medan, 25 Juni 2025

Pembimbing


Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si
NIDN: 0120097201

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801

Dekan


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Arifandi Hidayah Tanjung**, NPM 2103100047, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 17 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Arifandi Hidayah Tanjung

EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DI DI DESA PEMATANG SETRAK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Arifandi Hidayah Tanjung

2103100047

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan dengan perlindungan sosial salah satu nya adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan pemerintah sebagai identitas bagi penerima program perlindungan sosial. Hal ini dikarenakan persentase tingkat kemiskinan di Indonesia cukup tinggi sehingga program Kartu Keluarga Sejahtera ini diterapkan di berbagai daerah terutama Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Desa Pematang Setrak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan menggunakan Teori Efektivitas Program Kerja yang di kemukakan oleh Ralph L. Kliem dan Irwin S. Ludin (2007) dalam buku “Effective Program Management”. Metode penelitian yang digunakan da yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Program Kartu Keluarga Sejahtera ini berjalan kurang efektif, hal ini dapat dibuktikan dari tingkat pencapaian sasaran dalam penyaluran dana bantuan tidak sesuai. Data masyarakat penerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang sudah tidak masuk kriteria masih banyak terdaftar aktif sebagai penerima bantuan. Kriteria yang dimaksud adalah masyarakat yang sudah jadi PNS, Polisi, Tentara, P3K, Listrik dirumah 900 Kwh, dan Mempunyai Sepeda Motor Nmax.

Kata kunci : *Efektivitas, Pelayanan Publik, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Alhamdulillah selesainya skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai”**. Shalawat beiringkan salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan bagi umat manusia dengan adanya ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan ini tidak terlepas bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Yang tercinta dan tersayang orang tua saya Ayahanda Basramon Tanjung S.sos dan Ibunda Relingsih Triniawita Rambe S.Pd.SD yang telah mengasuh, mendidik, selalu memberikan yang terbaik kepada penulis dan menjadi orang yang paling berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa kepada adik saya Salsabila Ramadhani Tanjung yang selalu memberikan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Ayah, Ibu, dan Adik dalam lindungan Allah SWT.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rekrtror Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Assoc, Prof .Dr, Arifin Saleh, S.Sos., MSP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yusrina Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M,Si selaku ketua program studi Ilmu Admnistrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi dan memberi banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat. Terimakasih telah memberikan bimbingan, arahan yang banyak dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mempermudah memberikan informasi-informasi terkait perkuliahan.
8. Kepada Bapak Kepala Desa Pematang Setrak Bapak Rustian Handoko. SH yang telah mengizinkan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian di Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Terimakasih kepada seluruh staf desa pematang setrak dan narasumber-narasumber yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
10. Terimakasih kepada Deona Agnesia Pohan orang yang selalu ada di setiap hari-hari penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam

penyusunan skripsi. Berkontribusi baik tenaga, pikiran dan menjadi tempat cerita penulis dan semoga cita cita kami pulang kerumah yang sama dapat terwujud aamiin.

11. Kepada abang-abang/saudara teman serumah Bang Rahmad, Bang Feldi, Bang Jeremia, Angga, Fariz Faturrahman yang selalu support penulis dalam menyelesaikan penelitian ini

12. Kepada teman-teman seperjuangan di program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU Angkatan 2021

Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak kepada penulis. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, April 2025

Penulis

Arifandi Hidayah Tanjung
NPM 2103100047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Pengertian Efektivitas	9
2.2 Pendekatan Efektivitas.....	10
2.3 Pengertian Program Kerja	11
2.4 Jenis-Jenis Program Kerja.....	12
2.5 Pengertian Efektivitas Program Kerja.....	13
2.6 Pengertian Pelayanan Publik.....	14
2.7 Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).....	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Kerangka Konsep	19

3.3	Definisi Konsep	19
3.4	Kategorisasi Penelitian.....	21
3.5	Key Informan	21
3.6	Narasumber	22
3.7	Teknik Pengumpulan Data	22
3.8	Teknik Analisis Data	23
3.9	Waktu dan Lokasi Penelitian	23
3.10	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		28
4.1	Hasil Penelitian	28
4.1.1	Deskripsi Key Informan dan Narasumber	29
4.2	Deskripsi Hasil Wawancara dari Kategorisasi	29
4.2.1	Tingkat Pencapaian Sasaran.....	29
4.2.2	Kualitas Hasil.....	31
4.2.3	Proses Waktu Pelaksanaan	33
4.2.4	Kepuasan Masyarakat	35
4.3	Pembahasan.....	37
BAB V PENUTUP.....		44
5.1	Simpulan	44
5.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN		48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep	19
Gambar 3.2. Lokasi Desa Pematang Setrak Serdang Bedagai	24
Gambar 4.1 Foto Kantor Desa Pematang Setrak	25
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Kantor Desa Pematang Setrak	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Draf Wawancara
Lampiran II	: SK-1 Permohonan Penetapan Judul
Lampiran III	: SK-2 Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran IV	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran V	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: Surat Permohonan Ganti Judul Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
Lampiran IX	: Surat Terima Riset
Lampiran X	: Surat Selesai Riset
Lampiran XI	: SK -10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XII	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XIII	: Surat LoA
Lampiran XIV	: Dokumentasi
Lampiran XV	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi suatu bangsa karena kemiskinan tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Menurut Ritonga dalam Noor M dan Saleh, M, H (2021) Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya.

Menurut Royat dalam Widodo E, dkk (2021) Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,36 juta orang, perkembangan tingkat kemiskinan diklaim menurun setelah dilakukan

pendataan ulang oleh BPS per Maret 2022 dengan tingkat kemiskinan menjadi 9,54 persen menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Namun menurut BPS per September 2022 tingkat kemiskinan kembali naik 0.03 persen terhadap maret 2022 menjadi 9,57 persen. Kendati demikian tingkat kemiskinan di Indonesia menurun dilihat dari tahun sebelumnya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah kemiskinan, pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut, padahal dalam kesepakatan MDGs dunia Internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Pemerintah membuat sebuah kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan membuat program-program perlindungan sosial. Pemerintah telah melakukan berbagai Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan melakukan berbagai program, yaitu Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Bantuan Beras untuk Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan program lainnya.

Hingga pada saat ini Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diganti dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan pemerintah sebagai identitas bagi penerima program perlindungan sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Tentang Program

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat miskin adalah Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), untuk menjalankan program-program perlindungan sosial ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera melalui Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk membangun keluarga produktif.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 43 dijelaskan bagaimana distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat. Hal ini menguatkan bahwa program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah dijalankan oleh pemerintah

sebagai Langkah dalam rangka menganggulangi kemiskinan di Pusat, Kabupaten/Kota maupun Daerah di Indonesia.

Serdang Bedagai menjadi salah satu lokasi yang masyarakatnya mendapatkan program KKS terkhusus Desa Pematang Sertak Kecamatan Teluk Mengkudu karna tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Angka kemiskinan di Serdang bedagai Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sergai menunjukkan persentase penduduk miskin di Sergai 6,97 persen dari 682.918 jiwa pada tahun 2024 dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,11% dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,28%.

Melalui Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring hibah dan bantuan sosial pada BAB V yang berisi :

1. Memenuhi kriteria paling sedikit
 - a. Selektif
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
 - d. Sesuai tujuan penggunaan
2. Kriteria selektif sebagai mana yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

3. Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. Memiliki surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah
 - c. Terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial
 - d. Berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus yang diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
5. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan yang diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Namun kenyataan yang ada pada mekanisme yang dilakukan di Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 15 tahun 2021 pada Bab V tentang Bantuan Sosial. Terdapat beberapa kenyataan yang tidak sesuai hal ini dilakukan pada saat observasi awal di Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 15 Desember 2024.

Dalam perbincangan dengan salah satu masyarakat yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mengatakan Permasalahan yang dihadapi pihak desa dalam berjalan nya proses penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera salah satunya adanya kesalahan pendataan. Bahwasanya terdapat masyarakat warga dusun III Desa Pematang Sertak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai yang sudah mendaftar KKS tapi masih ada yang belum mendapat kan bantuan.

Bahkan masyarakat penerima KPM miskin ada yang belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Hal ini jadi salah satu pemasalahan yang dihadapi desa akibat adanya Eror System.

Permasalahan lain juga dihadapi dari segi kurangnya sosialisasi dari pihak desa mengenai bagaimana penggunaan KKS dan kurangnya pemberitahuan mengenai kapan uang bantuan akan dicairkan, sehingga banyak warga Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai tidak mengetahui keterbukaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Oleh karena fenomena dan permasalahan diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti **“Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Penerapan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pematang Sertak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerapan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pematang Sertak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengelola Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam mengatasi masalah yang ada.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Desa Pematang Sertak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Efektivitas, Program, Pelayanan Publik, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

BAB III : METODE PENELITIAN

Penulis Menguraikan Tentang Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan atau Narasumber dan Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti dan analisis hasil wawancara

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran semua hasil yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas Menurut Mahmudi dalam Dalimunthe (2017) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut Ravianto, (2014) pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Sementara menurut (Beni, 2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Dari Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan baik itu dalam konteks pekerjaan, kebijakan, atau pelayanan publik, efektivitas menunjukkan seberapa jauh hasil yang dicapai sesuai dengan

apa yang diharapkan dan ukuran keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal.

2.2 Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk melihat seberapa berhasil suatu aktivitas dilakukan. Salah satu cara mengukurnya adalah dengan a) Pendekatan sasaran, yang fokus pada seberapa sukses sebuah lembaga dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran Efektivitas dengan pendekatan ini berarti menetapkan sasaran yang realistis untuk mencapai hasil yang maksimal berdasarkan tujuan resmi "*Official Goal*", dengan memperhatikan masalah yang mungkin timbul. Fokus utamanya adalah pada output, yaitu mengukur seberapa berhasil program mencapai hasil yang telah direncanakan. Selain itu, ada juga b) Pendekatan sumber, yang menilai efektivitas berdasarkan kemampuan suatu lembaga dalam memperoleh berbagai sumber yang dibutuhkannya. c) Pendekatan proses, di sisi lain, menilai efektivitas berdasarkan efisiensi dan kondisi internal lembaga. Pendekatan ini lebih menekankan pada kegiatan internal lembaga dan bagaimana sumber daya yang dimilikinya dikelola, tanpa terlalu memperhatikan faktor eksternal. Ini menggambarkan tingkat efisiensi dan kesehatan organisasi tersebut.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran

yang realistis untuk memberikan hasil maksimal untuk mencapai output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

2.3 Program Kerja

Menurut Hasibuan (2016) program kerja merupakan komposisi rencana kegiatan yang telah disusun dan disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. Rencana ini disusun secara sistematis dan berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dalam meraih tujuan, serta berperan sebagai indikator untuk menilai pencapaian target pekerjaan yang akan dievaluasi di akhir periode

Menurut Munthe AP (2015) program kerja dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang terencana dengan sistematis untuk diimplementasikan dalam kegiatan nyata secara berkelanjutan dalam organisasi serta melibatkan banyak orang di dalamnya. Menurut Lubis JP (2020) program adalah sekumpulan instruksi yang dapat dipahami komputer yang disusun secara logis dan sistematis.

Program menurut Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Dari Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa program kerja adalah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan

tertentu dalam suatu instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, serta memperoleh alokasi anggaran yang diperlukan. Dengan demikian, program kerja memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terencana dan berkelanjutan.

2.4 Jenis – Jenis Program Kerja

Pengertian jenis-jenis program merujuk pada kategori atau klasifikasi program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam berbagai konteks, baik di sektor publik, swasta, maupun organisasi non-pemerintah.

Adapun jenis – jenis program kerja yaitu program memberdayakan masyarakat ertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil. Program kesehatan fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, seperti program imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan penyakit.

Pengertian jenis-jenis program merujuk pada kategori atau klasifikasi program yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam berbagai konteks, baik di sektor publik, swasta, maupun organisasi non-pemerintah. Jenis-jenis program mencerminkan berbagai pendekatan dan fokus dalam merancang inisiatif untuk mencapai tujuan tertentu. Memahami pengertian dan karakteristik masing-masing jenis program sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara efektif.

2.5 Efektivitas Program Kerja

Efektivitas Program Kerja yang di kemukakan oleh Ralph L. Kliem dan Irwin S. Ludin (2007) dalam buku “Effective Program Management” adalah kegiatan pelaksanaan nya harus sesuai dan tepat sasaran dalam menjalankan program kerja sehingga dapat mengetahui hasil dan kualitas kepuasan program kerja, efektifnya program kerja tergantung berapa lama waktu pelaksanaan nya.

Menurut Makmur (2015:6) berpendapat bahwa “efektivitas program kerja merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dicapai dimana ditunjukan dengan ketepatan harapan, kebijakan dan hasil yang dicapai”.

Menurut Mardiasmo (2016) efektivitas program kerja merupakan indikator sejauh mana sebuah program berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penilaian terhadap efektivitas ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan proses yang dilalui untuk mencapainya. Mardiasmo menekankan bahwa pentingnya evaluasi yang berkelanjutan diperlukan guna memastikan program tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan yang ada.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Efektivitas program kerja adalah ukuran sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan ketepatan pelaksanaan, kesesuaian antara harapan dan hasil yang dicapai, serta kualitas kepuasan dari program tersebut. Efektivitas tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dilalui dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu,

evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa program tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas program kerja mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan dampak positif yang diharapkan dari program tersebut.

2.6 Pelayanan Publik

Menurut Hajar S dkk (2022) Pelayanan Publik pada dasarnya tidak bisa lepas dari masyarakat karena pelayanan adalah bagian dari kegiatan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait. Dimana kualitas pelayanan publik dapat menjadi suatu indikator dalam mengukur kinerja pemerintahan di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, pelayanan publik juga menjadi tema di Negara yang perlu dicarikan solusinya dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik, karena melaksanakan pelayanan yang optimal tidaklah suatu hal yang mudah. Pelaksanaan pelayanan publik berkaitan dengan pengaturan suatu daerah.

Menurut Ali K dan Saputra A (2020) Pelayanan Publik yang optimal dapat mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab atau pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, dibutuhkan tata kelola pemerintahan desa yang dapat mewujudkan *good governance* tersebut melalui program peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Apabila tata kelola ini terwujud maka tujuan yang ditentukan dapat tercapai yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan seluruh potensi desa, memudahkan masyarakat dalam menerima informasi melalui ketersediaan data, mendorong partisipasi masyarakat, 9 transparansi dan akuntabilitas. Kemudian,

Perwujudan *good governance* di tingkat desa adalah salah satu percepatan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Rachman (2021) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam praktiknya, pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari konteks administrasi negara, terutama dalam hal efektivitas, efisiensi, dan keadilan distribusi layanan kepada masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak terlepas dari konteks administrasi negara, pelayanan publik menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk mencapai pelayanan publik yang optimal, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup profesionalisme, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat, memudahkan akses informasi, dan mengelola potensi daerah secara efektif. Dengan demikian, pelayanan publik yang berkualitas berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan di tingkat desa maupun secara keseluruhan.

2.7 Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 166 Tahun 2014 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan kartu penanda keluarga kurang mampu dimana masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah salah satu program pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pada awalnya program tersebut adalah hasil dari pengembangan program sebelumnya, yaitu dengan nama Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah dilaksanakan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kini program tersebut diubah secara bertahap menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Fungsi KKS selain menjadi penanda kurang mampu juga berfungsi sebagai kartu untuk mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Menurut Putri H dkk (2021) Kartu Keluarga Sejahtera merupakan salah satu program pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang berfungsi sebagai penanda masyarakat kurang mampu. Implementasi kebijakan KKS masih belum optimal karena faktor kurangnya sosialisasi dan informasi dari aparat desa dan kecamatan kepada masyarakat mengenai program yang dikeluarkan pemerintah.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berfungsi sebagai penanda masyarakat kurang mampu dan juga sebagai kartu identitas untuk mendapatkan Program Simpan Keluarga Sejahtera. Namun terkadang bantuan KKS kurang tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena penilaian calon penerima bantuan Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS) bersifat subjektif serta proses penyeleksian berjalan cukup lambat.

Menurut Sitanggang M (2021) Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Keluarga Kurang Mampu. Dengan adanya pelaksanaan program ini, pemerintah dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan perlindungan dan pemberdayaan. Data penerima manfaat Program Simpanan Keluarga Sejahtera menggunakan data-data yang berasal dari Basis Data Terpadu (BDT).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu. KKS berfungsi sebagai penanda status keluarga miskin dan sebagai kartu identitas untuk mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Program ini merupakan pengembangan dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang sebelumnya diluncurkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun KKS memiliki manfaat penting, penerapannya terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan proses seleksi yang lambat serta subjektif. Penerima manfaat data berasal dari Basis Data Terpadu (BDT)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif, dimaksudkan supaya mempermudah penulis dalam meneliti karena bersifat mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, mendalam, dan transparan, dengan proses wawancara kepada informan dan narasumber atau observasi penelitian secara langsung ke objek penelitian Efektivitas Penerapan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pematang Sertak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

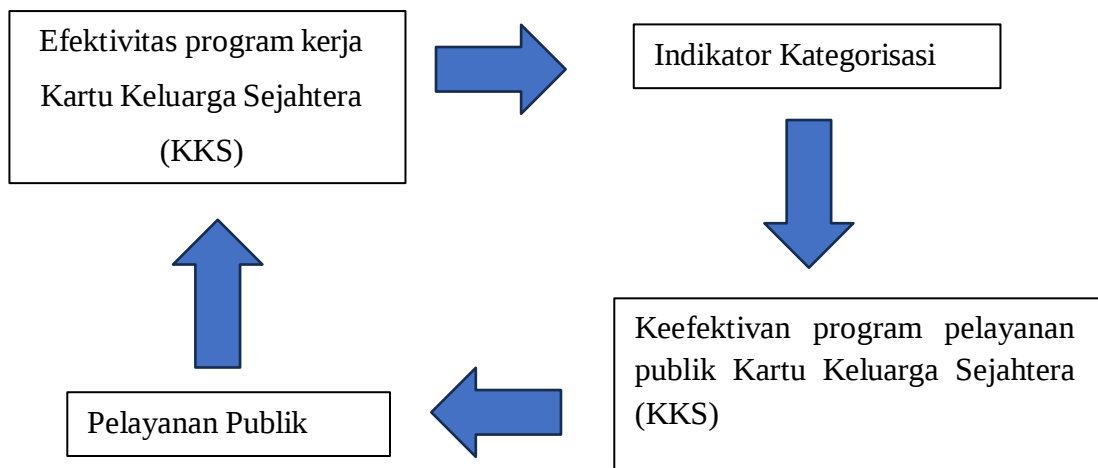
Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena lingkungan secara mendalam dan lebih rinci. Penelitian terjadi agar membantu pembaca dalam mengetahui apa yang terjadi di lingkungan penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan masalah-masalah mengenai program data atau pengalaman yang dialami oleh peneliti.

Menurut Amrizal D (2019) Metode deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan mendalam pada cara menggambarkan keadaan objek penelitian saat ini, berdasarkan fakta-fakta yang kelihatan atau apa adanya. Dengan alasan untuk mengetahui apakah fakta yang dijadikan variabel telah berjalan dengan baik atau tidak.

3.2 Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep yang penulis gambarkan dalam penelitian dengan judul Efektivitas Penerapan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Pematang Sertak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai.

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



Sumber : Olahan Peneliti 2025

3.3 Defenisi Konsep

Konsep adalah gagasan atau ide yang bermakna dan sempurna, yang merupakan salah satu pengertian tentang suatu objek. Konsep ialah berbagai produk subjektif yang bersumber dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalaman pribadi setelah melakukan suatu persepsi terhadap objek atau benda.

1. Efektivitas dapat diartikan sebagai efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan baik itu dalam konteks pekerjaan, kebijakan, atau pelayanan publik, efektivitas menunjukkan seberapa jauh hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan dan ukuran keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal.
2. Program kerja adalah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, serta memperoleh alokasi anggaran yang diperlukan.
3. Efektivitas program kerja adalah ukuran sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan ketepatan pelaksanaan, kesesuaian antara harapan dan hasil yang dicapai, serta kualitas kepuasan dari program tersebut.
4. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak terlepas dari konteks administrasi negara, pelayanan publik menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
5. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi Penelitian menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut.

1. Adanya tingkat pencapaian sasaran dalam menjalankan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Adanya kualitas hasil dalam menjalankan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Adanya waktu pelaksanaan dalam proses penerapan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai
4. Adanya kepuasan masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam penerapan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak Kab Serdang Bedagai.

3.5 Key Informan

Key informan adalah orang yang dianggap penulis mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Orang yang bertanggung jawab besar dalam jalannya proses produksi di lapangan. Sehingga key informan haruslah memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam berbagi informasi kepada penulis untuk memberikan informasi yang terkait.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu:

- a. Nama : Muhammad Ikhsan Nasution
Umur : 24 tahun

Jabatan : Staff Kantor

b. Nama : Rafiqa Utami Siregar

Umur : 38 tahun

Jabatan : Kasi Pelayanan

3.6 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka diperoleh dari informan dan narasumber yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dalam rangka efektivitas pelayanan berbasis digital.

a. Nama : Ammar Riswan

Usia : 25

Status : Masyarakat Desa Pematang Setrak

b. Nama : Joko Putrawan

Usia : 30

Status : Masyarakat Desa Pematang Setrak

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data dengan cara teknik wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan

untuk mendapatkan informasi, pendapat, atau pengalaman dari responden. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau menggunakan media digital, dan dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan penelitian dan jenis informasi yang ingin diperoleh.

3.8 Teknik Analisis Data

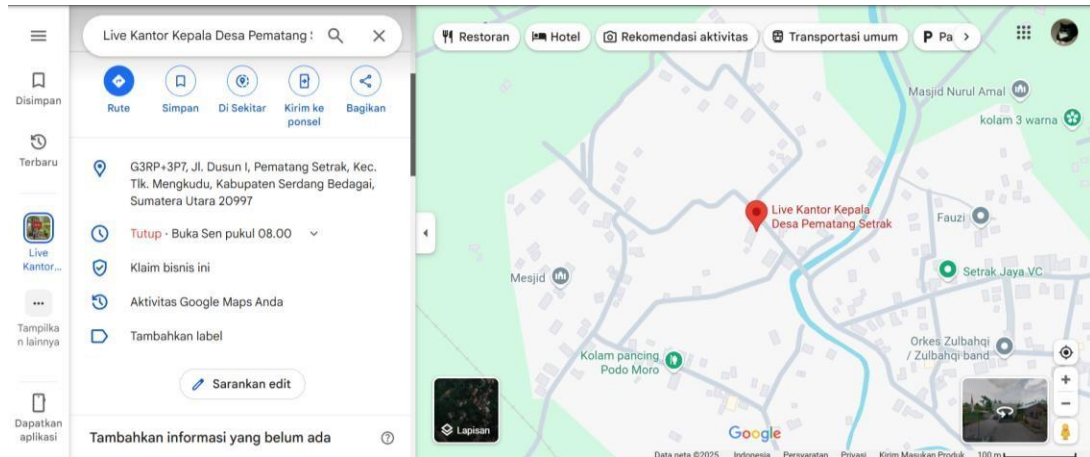
Menurut Elma Sutriani (2019) Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk mengetahui maknanya. Menyusun data berarti menggolongkannya menjadi sebuah tema, pola atau kategori sesuai dengan yang di maksud.

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokkan, menyamakan data yang sama dan membedakan data yang memang berbeda, serta menyisihkan pada kelompok lain data yang serupa, tetapi tidak sama.

3.9 Waktu dan Lokasi Penelitian

Demi mendapatkan daya yang diperlukan untuk menyusun skripsi penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Pematang Sertak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Adapun pelaksanaan penelitian ini adalah Februari 2025 sampai dengan selesai.

Gambar 3.2. Lokasi Kantor Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai



Sumber : Google Maps

3.10 Deskripsi Objek Penelitian

a. Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai

Desa yang terletak di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai ini adalah sebuah desa yang terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 8 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 30°C. Desa Pematang Setrak memiliki luas wilayah $\pm 670,64$ Ha yang berbatasan disebelah utara dengan desa sialang buah, sebelah selatan berbatasan dengan desa mata pao, sebelah timur berbatasan dengan desa liberia, sebelah barat berbatasan dengan desa pasar baru.

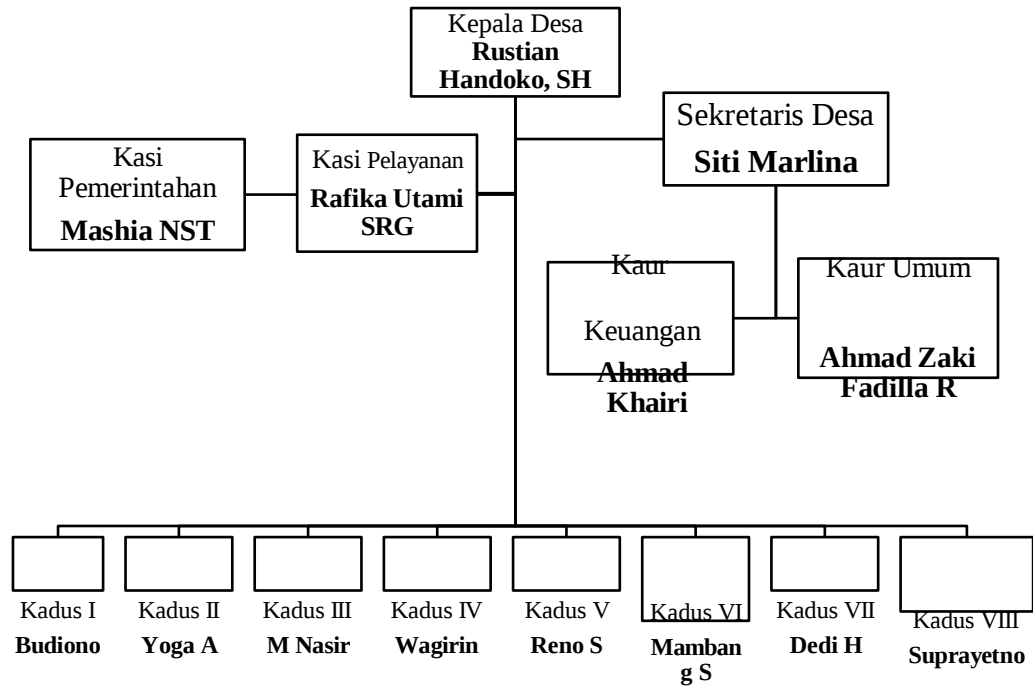
Desa pematang setrak memiliki daratan yang bertofografi tanah datar, terdapat 202,92 Ha digunakan untuk perkebunan. Umumnya tanah yang digunakan oleh masyarakat di desa Pematang Setrak adalah sebagian besar digunakan untuk perkebunan. Jumlah penduduk Desa Pematang Setrak Berkisar 4.249 jiwa pada tahun 2023 jumlah ini akan terus bertambah atau berkurang. Suku Bangsa yang

- d) Gerakan maghrib mengaji dengan menyeimbangkan sarana dan prasarana pendukung serta meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji, guru minggu, bilal mayit dan bilal kubur.
- e) Gerakan peningkatan usaha mikro dan kecil menengah untuk penghasilan yang lebih baik.
- f) Menata CEO wisata pertanian yang merupakan skala strategis dalam peningkatan pendapatan asli desa.

c. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Pematang Setrak secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor yang berbeda-beda pula, sebahagian besar disektor non formal seperti: wirausaha, wiraswasta, buruh bangunan, buruh tani, menarik becak bernotor, buruh lepas, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sawit dan sebahagian kecil disektor formal seperti PNS pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis, TNI/Polri, dil.

d. Struktur Organisasi Desa Pematang Setrak



Sumber : Olahan Penelitian 2025

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis akan membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan. Penelitian ini berfokus pada pendapat para informan dan berlangsung di Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai, dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas program kartu keluarga sejahtera (KKS) di desa pematang setrak kabupaten Serdang bedagai. Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk memahami objek yang diteliti dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Bab ini berisi penyajian dan analisis data hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang mana data diambil melalui wawancara atau tanya jawab dengan informan. Proses wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang relevan terhadap rumusan masalah dan mengumpulkan data yang mendukung penelitian ini. Data yang dikumpulkan berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan mengenai masalah yang ada dalam skripsi ini. Proses pengumpulan data berlangsung sekitar satu bulan.

Penelitian ini dilaksanakan pada 19 April 2025 sampai 1 Mei 2025 di Kantor Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai. Wawancara dilakukan mendapatkan tanggapan dari pertanyaan yang diselidiki dan menerima data lain yang didukung oleh penelitian ini. Sumber data dari penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 staff kantor desa, 1 kasi pelayanan, dan 2 masyarakat desa.

4.1.1 Deskripsi Key Informan dan Narasumber

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi berdasarkan wawancara guna memperoleh informasi yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Berikut adalah nama key informan dan narasumber.

Tabel 4.1 Key informan

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Ikhsan Nasution	Staff Kantor
2.	Rafiq Utami Siregar	Kasi Pelayanan

Adapun narasumber nya sebagai berikut

Tabel 4.2 Narasumber

No	Nama	Status
1.	Ammar Riswan	Masyarakat
2.	Joko Putrawan	Masyarakat

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

4.2.1 Tingkat Pencapaian Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 14 April 2025 Pukul 09.32 WIB dengan Bapak Muhammad Ikhsan Nasution sebagai Staff Kantor, beliau menyatakan bahwa Untuk ketepatan sasaran nya bisa dibilang sudah 80%

sisanya masih ada data yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima KKS tidak selalu mutakhir. Hal ini bisa menyebabkan keluarga yang seharusnya menerima bantuan tidak terdaftar, sementara ada juga yang tidak layak tetapi tetap menerima. Namun, terdapat 20% sisanya yang masih menjadi tantangan dalam implementasi program ini, terutama terkait dengan mutakhirnya data yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rafiq Utami Siregar sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Desa Pematang Setrak pada hari Kamis, 17 April 2025, pukul 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa Permasalahan utama terletak pada kualitas dan kemutakhiran data yang menjadi acuan dalam menyeleksi calon penerima KKS. Data yang digunakan seringkali tidak diperbarui secara berkala dan real-time, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara kondisi real di lapangan dengan informasi yang tercatat dalam basis data. Contoh terdapat sejumlah keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan justru tidak terdaftar dalam sistem. Kelompok ini termasuk keluarga miskin baru yang baru saja mengalami penurunan kondisi ekonomi, atau keluarga yang mengalami perubahan situasi seperti kematian kepala keluarga, bencana alam, atau kejadian darurat lainnya yang membuat ekonomi mereka menjadi rentan.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Joko Putrawan sebagai salah satu penerima kartu keluarga sejahtera pada hari sabtu , 19 April 2025, pukul 10.00 WIB, beliau menyampaikan bahwa Kendala pertama yang dihadapi dalam proses pengusulan bantuan adalah kompleksitas prosedur yang cukup rumit dan membingungkan, di mana penerima harus melalui berbagai tahapan

administrasi yang memerlukan pengumpulan dokumen dan informasi yang cukup banyak. Selain itu, terdapat ketidakjelasan yang signifikan mengenai waktu pencairan bantuan, yang sering kali membuat penerima merasa cemas dan tidak pasti. Bantuan yang diharapkan baru diterima setelah hampir tiga bulan, tanpa adanya pemberitahuan atau informasi yang jelas mengenai status pengajuan mereka. Hal ini menyebabkan penerima mengalami kesulitan dalam merencanakan kebutuhan sehari-hari, karena mereka tidak tahu kapan bantuan akan datang. Penundaan yang berkepanjangan ini tidak hanya menambah beban ekonomi bagi keluarga yang sudah dalam kondisi rentan, tetapi juga menciptakan frustrasi dan ketidakpuasan terhadap program bantuan yang seharusnya meringankan beban mereka. Akibatnya, banyak penerima merasa terabaikan dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem bantuan yang ada, yang seharusnya dirancang untuk membantu mereka dalam situasi sulit.

Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh masyarakat penerima kartu keluarga sejahtera bapak Ammar Riswan, beliau mengatakan Kendala pertama terkait pengusulan bantuan adalah prosesnya yang cukup rumit, serta ketidakjelasan mengenai waktu pencairan bantuan. Terkadang, bantuan baru diterima setelah hampir tiga bulan tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga penerima merasa kesulitan dan mengalami masalah akibat penundaan tersebut.

4.2.2 Kualitas Hasil

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 22 April 2025 Pukul 11.42 WIB dengan Bapak Muhammad Ikhsan Nasution sebagai Staff Kantor, beliau menyatakan bahwa Kualitas hasil dari program kartu keluarga

sejahtera (KKS) memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Berdasarkan pengalaman pribadi, bantuan pemerintah melalui program ini telah memberikan kontribusi positif dalam menunjang kehidupan keluarga. Program ini merupakan wujud nyata peran negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rafiqha Utami Siregar sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Desa Pematang Setrak pada hari Rabu, 23 April 2025, pukul 10.30 WIB beliau mengatakan bahwa Agar kualitas hasil program kartu keluarga sejahtera terus meningkat langkah yang kami ambil setelah proses seleksi dan verifikasi adalah melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan akurasi data penerima bantuan. Hal ini kami lakukan karena dalam pelaksanaan sebelumnya ditemukan beberapa ketidaksesuaian, di mana terdapat penerima bantuan yang bukan berasal dari usulan kami, sementara ada juga kasus dimana anak-anak usia sekolah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru terdaftar sebagai penerima manfaat.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ammar Riswan sebagai salah satu penerima kartu keluarga sejahtera pada hari Jumat , 25 April 2025, pukul 15.13 WIB, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa keluhan dari kualitas hasil pada program kartu keluarga sejahtera diantaranya keterlambatan dalam pencairan dana, permasalahan penerima yang terdaftar tidak mendapatkan bantuan, penyaluran belum tepat sasaran dan verifikasi yang ribet. Kami sebagai

masyarakat mengeluhkan hal tersebut sebagai kualitas hasil dari program kartu keluarga sejahtera. Kami harapkan untuk memperbaiki kualitas hasil dalam menjalankan program ini pihak dinas dan desa harus lebih kerja keras lagi dalam mengatasi masalah.

Sama hal nya dengan pendapat dari narasumber penerima kartu keluarga sejahtera bapak Joko Putrawan, beliau mengatakan bahwa Ada beberapa keluhan yang muncul terkait kualitas hasil dari program Kartu Keluarga Sejahtera. Beberapa di antaranya meliputi keterlambatan dalam pencairan dana, masalah penerima yang terdaftar namun tidak menerima bantuan, penyaluran yang belum tepat sasaran, serta proses verifikasi yang dianggap rumit. Kami, sebagai masyarakat, menyampaikan keluhan ini sebagai cerminan dari kualitas hasil program Kartu Keluarga Sejahtera. Kami berharap pihak dinas dan desa dapat berupaya lebih keras dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk meningkatkan kualitas hasil program ini.

4.2.3 Proses Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 28 April 2025 Pukul 11.23 WIB dengan Bapak Muhammad Ikhsan Nasution sebagai Staff Kantor, beliau menyatakan bahwa Proses waktu pelaksanaan dalam proses pengusulan, dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan hingga peserta dapat menerima bantuan. Namun demikian, penerbitan kartu fisik KKS umumnya memerlukan waktu lebih lama karena berbagai kendala teknis. Salah satu faktor yang menyebabkan penundaan adalah tingginya angka permohonan yang membuat antrian penerbitan kartu relatif panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun

waktu pengusulan telah ditetapkan 1 bulan secara prosedural, namun pada implementasinya masih sering ditemui keterlambatan akibat berbagai faktor administrasi dan teknis yang perlu diselesaikan secara bertahap.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rafiqa Utami Siregar sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Desa Pematang Setrak pada hari Selasa, 29 April 2025, pukul 10.30 WIB beliau mengatakan yang dilakukan pemerintah desa jika terdapat masalah dalam waktu pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera bahwa pemerintah desa melakukan beberapa langkah untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera (KKS), antara lain dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengusulan dan penanganan KKS, serta meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan pihak terkait untuk mempercepat proses verifikasi dan distribusi kartu. Selain itu, pemerintah desa juga berupaya melakukan validasi data secara berkala untuk memastikan akurasi informasi yang digunakan dalam program ini.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ammar Riswan sebagai salah satu penerima kartu keluarga sejahtera pada hari Rabu , 30 April 2025, pukul 14.19 WIB, beliau mengatakan bahwa masalah ketepatan waktu dalam pencairan bantuan Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk proses verifikasi dan distribusi. Namun, informasi spesifik mengenai durasi dari narasumber masyarakat desa tidak tersedia dalam hasil pencarian.

Warga berharap waktu pelaksanaan dipersingkat, terutama dengan peningkatan kapasitas petugas, perbaikan sistem administrasi digital,

dan koordinasi yang lebih cepat antara desa, kecamatan, dan dinas terkait. Dengan demikian, bantuan bisa sampai tepat waktu kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Sama halnya dengan pendapat dari narasumber penerima kartu keluarga sejahtera bapak Joko Putrawan, beliau mengatakan bahwa waktu ketepatan waktu dalam proses pelaksanaan program ini masih kurang, karena masih banyak keterlambatan yang tidak bisa ditoleransi mau terkdang sampai 4 bulan baru semua pencairan dana bantuan baru keluar, itu pun masih ada yang terlambat

4.2.4 Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 1 Mei 2025 Pukul 09.39 WIB dengan Bapak Muhammad Ikhsan Nasution sebagai Staff Kantor, beliau menyatakan bahwa banyak keluhan soal tingkat kepuasan program kartu keluarga sejahtera ini kepada kami yaitu besaran bantuan yang diberikan dinilai masih kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jumlah bantuannya tidak sebanding dengan biaya hidup sekarang, apalagi harga kebutuhan pokok terus naik dan juga masalah ketidakpastian waktu penyaluran dana sering terjadi. Bantuan kerap tertunda berbulan-bulan tanpa kejelasan yang pasti karna banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Keluhan-keluhan ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem, baik dalam hal besaran bantuan yang lebih realistis, mekanisme penyaluran yang tepat waktu, maupun penyederhanaan prosedur pencairan di bank. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengevaluasi dan memperbaiki kendala-kendala tersebut agar

program KKS benar-benar efektif meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rafiq Utami Siregar sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Desa Pematang Setrak pada hari Selasa, 2 Mei 2025, pukul 10.45 WIB Bantuan dari Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sangat berarti bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki anak sekolah, orang tua, dan keluarga dengan anak disabilitas, Bagi keluarga yang memiliki anggota dengan disabilitas, bantuan ini menjadi lebih krusial. Namun, meskipun bantuan ini sangat dibutuhkan, masih ada tantangan yang dihadapi. Banyak keluarga yang merasa bahwa jumlah bantuan yang diterima tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, meskipun Program KKS memberikan dukungan yang signifikan bagi keluarga-keluarga ini, masih ada harapan untuk perbaikan dalam hal jumlah bantuan, kecepatan penyaluran, dan kemudahan akses, agar semua keluarga, terutama yang memiliki anak sekolah dan anak disabilitas, dapat merasakan manfaat yang lebih optimal dari program ini.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ammar Riswan sebagai salah satu penerima kartu keluarga sejahtera pada hari Jumat , 3 Mei 2025, pukul 15.13 WIB, beliau mengatakan bahwa Yang membuat kami merasa puas itu terutama dari cara petugas melayani. Waktu mengurus KKS, saya dapat penjelasan yang jelas dari awal sampai akhir. Kepala dusun dan petugas desa sabar ngejelasin syarat-syaratnya, terus ngasih tahu kapan kira-kira bantuannya cair. Tapi yang paling berkesan itu waktu anak saya sakit, petugas KKS datang ke rumah bantu

urus rujukan ke puskesmas. Mereka gak cuma ngurusin duit doang, tapi benar-benar peduli sama kondisi kami.

Namun berbeda dengan pendapat dari narasumber penerima kartu keluarga sejahtera bapak Joko Putrawan, beliau mengatakan bahwa dalam hal penyaluran bantuan sering terjadi hambatan yang mengakibatkan terlambatnya dana bantuan sosial turun. Dana bantuan yang biasanya sebulan sekali, kini sering sekali per tiga bulan ketidaklancaran penyaluran ini terjadi karena masalah sistem yang ada di bank penyalur, selain itu pendaftaran verifikasi yang tergolong rumit membuat masyarakat bingung dengan mekanisme yang ada, sehingga masyarakat yang kurang mengetahui hal tersebut sering sekali ketinggalan informasi mengenai program tersebut. Hal ini menjadi alasan ketidakpuasan masyarakat terhadap adanya program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Tingkat Pencapaian Sasaran

Sasaran dalam penerima bantuan juga harus diperhatikan dan sesuai kriteria yang sudah tercantum dalam peraturan pemerintah. Pengawas pendamping TKSK di setiap dusun harus memperbarui data masyarakat di setiap dusun supaya sasaran dalam penyaluran dana Kartu Keluarga Sejahtera lebih efektif.

Proses mekanisme penyaluran tersebut diterapkan sebagai prosedur yang harus diikuti oleh setiap penerima bantuan (KKS). Proses ini memicu permasalahan atau kendala dari beberapa kalangan. Program KKS menghadapi beberapa

tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah akurasi data penerima. Masalah dalam pendataan dapat menyebabkan penerima yang tidak layak tetap terdaftar, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembaruan data secara berkala dan melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi.

Proses yang rumit ini dapat mencakup berbagai tahapan, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penyaluran dana. Ketidakjelasan dalam prosedur ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan penerima, yang mungkin tidak sepenuhnya memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkan bantuan.

Keterlambatan dalam penyaluran dana juga menjadi kendala yang sering dihadapi. Beberapa daerah mengalami masalah dalam distribusi bantuan, yang dapat mempengaruhi kemampuan penerima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, aksesibilitas bagi keluarga di daerah terpencil juga menjadi tantangan, di mana mereka mungkin kesulitan untuk mengakses layanan dan fasilitas yang diperlukan.

4.4.2 Kualitas Hasil

Di Desa Pematang Setrak, pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menunjukkan hasil yang bervariasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, program ini telah memberikan bantuan yang signifikan kepada keluarga miskin, membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, Pendidikan, dan Kesehatan. Namun, kualitas hasil yang dicapai tidak selalu konsisten, tergantung pada berbagai faktor, termasuk efektivitas

penyaluran bantuan dan pemahaman masyarakat tentang cara memanfaatkan KKS.

Salah satu indikator kualitas hasil adalah tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap bantuan yang diterima. Di Desa Pematang Setrak, beberapa keluarga melaporkan bahwa bantuan yang diberikan cukup membantu, tetapi ada juga yang merasa bahwa jumlah bantuan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap besaran bantuan yang diberikan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu penting untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai agar dapat memberikan dampak yang maksimal.

Kualitas hasil program KKS juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendataan dan verifikasi. Jika masyarakat aktif terlibat dalam memberikan informasi yang akurat tentang kondisi mereka, maka program ini akan lebih efektif dalam menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya data yang akurat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hasil program KKS di Desa Pematang Setrak.

Untuk meningkatkan kualitas hasil program KKS di Desa Pematang Setrak, langkah pertama yang dapat diambil adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap besaran bantuan yang diberikan. Pemerintah perlu mengumpulkan data dan umpan balik dari penerima manfaat untuk memahami kebutuhan mereka. Dengan informasi yang akurat, pemerintah dapat menyesuaikan jumlah bantuan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat

memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Langkah kedua adalah memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan agar lebih efisien dan tepat waktu. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan bank penyalur untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah administratif yang menyebabkan keterlambatan. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan sistem teknologi informasi juga dapat membantu mempercepat proses penyaluran. Dengan memastikan bahwa bantuan disalurkan tepat waktu, penerima manfaat akan lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa mengalami keterlambatan.

Langkah ketiga adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai program KKS. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan kampanye informasi yang lebih intensif untuk menjelaskan cara menggunakan KKS dan manfaat yang dapat diperoleh. Dengan memberikan pelatihan dan informasi yang jelas, diharapkan penerima manfaat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta cara memanfaatkan bantuan yang diberikan secara optimal. Peningkatan pemahaman ini akan berkontribusi pada keberhasilan program KKS dalam mencapai tujuannya.

4.4.3 Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan merupakan faktor krusial dalam proses penerapan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak. Proses ini dimulai dengan tahap pendataan yang dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi keluarga yang berhak menerima bantuan. Pendataan yang tepat waktu sangat penting agar data yang digunakan akurat dan mencerminkan kondisi terkini masyarakat. Jika pendataan terlambat, maka keluarga yang membutuhkan

bantuan dapat terlewatkan, sehingga mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuannya.

Setelah pendataan, tahap berikutnya adalah verifikasi data dan penyaluran bantuan. Proses verifikasi harus dilakukan dengan cepat dan efisien agar bantuan dapat segera disalurkan kepada penerima manfaat. Keterlambatan dalam verifikasi dapat menyebabkan penundaan dalam penyaluran dana, yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga yang menunggu bantuan.

Selain itu, waktu pelaksanaan juga berpengaruh pada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai program KKS. Sosialisasi yang dilakukan sebelum dan selama pelaksanaan program sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai penerima manfaat. Jika sosialisasi terlambat, masyarakat mungkin tidak akan siap untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan, sehingga mengurangi dampak positif dari program. Oleh karena itu, perencanaan waktu yang baik dalam setiap tahap pelaksanaan program KKS sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jumlah keluarga yang terdaftar dan efisiensi proses yang diterapkan. Proses dimulai dengan pendataan, yang biasanya memerlukan waktu antara 1 hingga 3 bulan. Pendataan ini penting untuk mengumpulkan informasi akurat mengenai kondisi setiap keluarga agar dapat menentukan kelayakan mereka sebagai penerima manfaat.

4.4.4 Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dalam penerapan Program KKS di Desa Pematang Setrak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu alasan yang membuat KPM merasa puas adalah besaran bantuan yang diberikan. Jika bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, Pendidikan, dan Kesehatan, maka KPM cenderung merasa terbantu dan puas dengan program ini. Selain itu, kemudahan akses dalam proses pencairan bantuan juga berkontribusi pada tingkat kepuasan. Jika KPM tidak mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan, mereka akan lebih menghargai program ini.

Namun, di sisi lain, ada juga faktor yang membuat KPM merasa tidak puas dengan program KKS. Salah satu alasan utama adalah ketidakpastian dan keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Jika KPM harus menunggu lama untuk menerima bantuan yang dijanjikan, hal ini dapat menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme program dan hak-hak KPM juga dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan. Jika KPM tidak memahami cara kerja program, mereka mungkin merasa tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan KPM adalah akurasi data penerima manfaat. Jika ada kesalahan dalam pendataan yang mengakibatkan keluarga yang seharusnya menerima bantuan tidak terdaftar, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pihak penyelenggara untuk memastikan bahwa proses pendataan dan verifikasi dilakukan dengan cermat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas program kerja kartu keluarga sejahtera di Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Tingkat pencapaian sasaran dalam penyaluran dana bantuan melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kurang efektif dikarenakan mekanisme yang diterapkan terlalu berbelit dan tidak sesuai dengan prosedur atau SOP.
2. Kualitas hasil program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Setrak menunjukkan kebermanfaatan bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu adanya kualitas hasil dalam menjalankan program ini sudah dapat dikatakan efektif.
3. Waktu Pelaksanaan dalam program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Pematang Setrak menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan, yang berkisar antara 3 hingga 6 bulan, dapat dianggap kurang efektif. Proses yang panjang ini, yang meliputi pendataan, verifikasi data, dan penyaluran bantuan, berpotensi menghambat akses keluarga miskin terhadap bantuan yang sangat dibutuhkan.
4. kepuasan masyarakat atau KPM dalam penerapan Program KKS di Desa Pematang Setrak dapat disimpulkan dengan hasil yang menunjukkan kurang baik. Meskipun ada beberapa KPM yang merasa puas dengan besaran bantuan

dan kemudahan akses, ada juga diantara mereka yang mengalami ketidakpuasan akibat keterlambatan penyaluran bantuan,

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa masukan atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Saran ini ditujukan untuk pengelola kartu keluarga sejahtera sebaiknya dilakukan penyederhanaan dalam proses penyaluran bantuan untuk meningkatkan ke efektifan dalam pencapaian sasaran. Prosedur yg terlalu berbelit belit perlu disederhanakan agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). pelatihan teknis atau diklat kepada aparat desa dan penyalur itu juga penting guna memastikan penerapan program berjalan dengan baik.
2. Sebaiknya perlu dilakukan upaya penguatan elemen elemen yang mendukung keberhasilan program. misalnya dengan menjaga distribusi dalam penyaluran bantuan, meningkatkan kualitas pelayanan dalam program KKS, dan evaluasi rutin untuk terus menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat.
3. Dalam hal meminimalisir waktu pelaksanaan yang cukup panjang, terutama pada tahap pendataan dan verifikasi penerapan teknologi informasi seperti sistem digitalisasi data, sebaiknya memanfaatkan AI atau bot yang mampu mempercepat proses pendataan dan verifikasi serta meminimalisir kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Z. (2021). Fungsi Perencanaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Kebersihan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. *JIMAWA: Jurnal Ilmiah*, 1(2)
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614
- Amrizal, D. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Dzulqurnain, D. A., & Sari, D. R. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:(Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 233250.
- Hajar, S., Ali, K., Saputra, A., Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(1), 136-142.
- Ibrahim, N., Mahmud, R., & Wantu, SM (2023). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8 (4), 5360-5374.
- Kholik, K., Sari, M. T., Hajar, S., Saputra, A., & Saragih, I. J. (2022). Dimensi Kualitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Manajemen Mutu Di Puskesmas Kota Medan. *Jurnal Sinar Manajemen*, 9(3), 496-506.
- Lubis, JP (2020). Efektivitas Program Samsat Keliling Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Kota Pinang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*, 2 (3).
- Munthe, AP (2015). Pentingnya program evaluasi di institusi pendidikan: sebuah pengantar, pengertian, tujuan dan manfaat. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5 (2), 1-14.
- Putri, H., Purnamasari, A. I., Dikananda, A. R., Nurdiawan, O., & Anwar, S. (2021). Penerima Manfaat Bantuan Non Tunai Kartu Keluarga Sejahtera Menggunakan Metode NAÏVE BAYES dan KNN. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 3(3), 331-337.

- Ramadhan, I. (2021). Fungsi Perencanaan Partisipatif Dalam Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Binjai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(4).
- Sumantri, I. I., & Andini, I. A. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 4(1), 50-63.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 51-61.
- Sitanggang, M. (2021). Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*, 2 (3).

Sumber Hukum :

- Badan Pusat Statistik. (2022). Tentang Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.
- Laporan 'East Asia and The Pacific Economic Update October 2022', Bank Dunia (World Bank)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014. Tentang Instruksi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menandai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu
- Peraturan Presiden RI No 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan
- Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

LAMPIRAN

Acc
Draft Wawancara
20/3-2025
[Signature]

DRAFT WAWANCARA

Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai :

Nama :

Umur :

Jabatan/Pekerjaan :

Menurut dari Teori Efektivitas Program Kerja yang di kemukakan oleh Ralph L. Kliem dan Irwin S. Ludin (2007) dalam buku "*Effective Program Management*" dengan indikator yang dijadikan sebagai kategorisasi penelitian adalah sebagai berikut :

A. Adanya tingkat pencapaian sasaran dalam penyaluran dana bantuan melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai

1. Apakah program kartu keluarga sejahtera dalam proses penyaluran dana sudah tepat dengan sasaran?
2. Apakah sejauh ini sasaran dalam penyaluran dana dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah ada yang tercapai ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses meningkatkan sasaran penyaluran dana pada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ?

B. Adanya kualitas hasil dalam menjalankan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai

1. Bagaimana kualitas hasil yang dirasakan setelah hadirnya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ?
2. Sejauh ini apakah terdapat keluhan hasil dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ?
3. Apa saja langkah yang diambil agar kualitas hasil program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat terus meningkat ?

- C. Adanya waktu pelaksanaan dalam proses penerapan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai
1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ?
 2. Apakah terdapat masalah ketepatan waktu dalam pencairan bantuan pada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ?
 3. Apa yang dilakukan pemerintah desa jika terdapat masalah dalam waktu pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ?
- D. Adanya kepuasan masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam penerapan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak Kab Serdang Bedagai
1. Apakah masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa puas dengan hadirnya program ini ?
 2. Apa saja hal yang membuat masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa puas ?
 3. Dan apa saja hal yang membuat masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa tidak puas ?

Demikianlah Draft Wawancara ini dibuat sebagai indikator dan parameter peneliti dalam mencari informasi di lapangan, yang akan di sampaikan pada pihak terkait di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan maksud untuk memenuhi kelengkapan data terkait judul penelitian yaitu "Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai.

Medan, 14 Maret 2025
Hormat Saya
Peneliti

Arifandi Hidayah Tanjung
2103100047

Pedoman Wawancara Informan

Nama : Muhammad Ikhsan Nasution
Jabatan : Staff Kantor
Umur : 24 tahun
Lokasi : Kantor Desa Pematang Setrak

a. Tingkat Pencapaian Sasaran.

1. Apakah program kartu keluarga sejahtera dalam proses penyaluran dana sudah tepat dengan sasaran?

Jawab : Sasaran utama Program KKS di desa kami adalah keluarga pra-sejahtera, khususnya yang memiliki balita, lansia, atau anggota keluarga disabilitas. Kami memprioritaskan mereka yang penghasilannya di bawah UMKM lokal.

2. Apakah sejauh ini sasaran dalam penyaluran dana dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah ada yang tercapai?

Jawab : Sudah, ya salah satunya ya masyarakat yang terferivikasi keluarga miskin sesuai data akan mendapat bantuan.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses meningkatkan sasaran penyaluran dana pada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ?

Jawab : kendala terbesar adalah data yang tidak selalu update, misalnya, ada keluarga yang sudah lebih sejahtera tapi masih terdaftar, sementara yang benar-benar kekurangan malah belum tercatat. Kami sedang memperbaiki sistem verifikasi agar lebih tepat sasaran.

b. Kualitas Hasil

1. Bagaimana kualitas hasil yang dirasakan setelah hadirnya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ?

Jawab : Kualitas hasil nya memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Berdasarkan pengalaman pribadi, bantuan pemerintah melalui program ini telah memberikan kontribusi positif dalam menunjang kehidupan keluarga. Program ini merupakan wujud nyata peran negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

2. Sejauh ini apakah terdapat keluhan hasil dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ?

Jawab : Sejauh ini keluhan nya banyak, diantaranya yang dapat kadang ya tadi, belum tepat sasaran terus dalam penyaluran dana kadang terlambat jadi masyarakat mengeluhkan hal tersebut.

3. Apa saja langkah yang diambil agar kualitas hasil program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat terus meningkat ?

Jawab : Langkah yang di ambil Setelah di pilih dan diverifikasi masyarakat yang kami pilih dan usul kan harus turun juga kelapangan karena selama ini ada ada juga yang bukan kami usul kan juga menerima dan dapat bantuan nya dek, dan bahkan ada juga anak sekolah

masuk dalam pendataan yang seharusnya tidak masuk kriteria penerima.

c. Proses Waktu Pelaksanaan

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ?

Jawab : Proses waktu pelaksanaan dalam proses pengusulan, dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan hingga peserta dapat menerima bantuan. Namun demikian, penerbitan kartu fisik KKS umumnya memerlukan waktu lebih lama karena berbagai kendala teknis. Salah satu faktor yang menyebabkan penundaan adalah tingginya angka permohonan yang membuat antrian penerbitan kartu relatif panjang

2. Apakah terdapat masalah ketepatan waktu dalam pencairan bantuan pada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ?

Jawab : Ada, masih adanya keterlambatan waktu pencairan dananya

3. Apa yang dilakukan pemerintah desa jika terdapat masalah dalam waktu pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Yang kami lakukan untuk mengatasi masalah adalah dengan melakukan sosialisasi

d. Kepuasan Masyarakat

1. Apakah masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa puas dengan hadirnya program ini?

Jawab : Kepuasan masyarakat terhadap Program KKS di desa kami cukup tinggi, terutama karena besaran bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Kami melakukan survei setiap tahun untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran.

2. Apa saja hal yang membuat masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa puas?

Jawab : Misalnya, banyak keluarga yang mengaku bisa memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan anak-anak mereka berkat bantuan ini. Selain itu, kami juga berusaha mempermudah proses pencairan. Kami sudah bekerja sama dengan bank lokal untuk memastikan KPM tidak mengalami kesulitan saat mengambil dana.

3. Dan apa saja hal yang membuat masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa tidak puas?

Jawab : Kami akui memang masih ada keluhan dari masyarakat tentang Program KKS ini. Yang paling sering adalah masalah keterlambatan pencairan bantuan. Kadang warga sudah menunggu sampai 3 bulan untuk pencairan pertama, padahal kebutuhan harian tidak bisa ditunda.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : Rafiq Utami Siregar
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan
Umur : 38 tahun
Lokasi : Kantor Desa Pematang Setrak

a. Tingkat Pencapaian Sasaran

1. Apakah program kartu keluarga sejahtera dalam proses penyaluran dana sudah tepat dengan sasaran?

Jawab : Ya Permasalahan utama terletak pada kualitas dan kemutakhiran data yang menjadi acuan dalam menyeleksi calon penerima KKS. Contoh terdapat sejumlah keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan justru tidak terdaftar dalam sistem

2. Apakah sejauh ini sasaran dalam penyaluran dana dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah ada yang tercapai?

Jawab : sudah, Kami menargetkan tiga kelompok utama: (1) keluarga dengan anak sekolah dari SD sampai SMA, (2) ibu hamil dan balita stunting, dan (3) lansia tanpa pendapatan tetap.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses meningkatkan sasaran penyaluran dana pada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Kendala nya ya Data yang digunakan seringkali tidak diperbarui secara berkala dan real-time, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara kondisi real di lapangan dengan informasi yang tercatat dalam basis data.

b. Kualitas Hasil

1. Bagaimana kualitas hasil yang dirasakan setelah hadirnya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Kualitas hasil yang dirasakan sangat bermanfaat untuk masyarakat desa, sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan sekolah dan kebutuhan lain nya.

2. Sejauh ini apakah terdapat keluhan hasil dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Sejauh ini ya keluhan yang dirasakan ya dalam pelaksanaan sebelumnya ditemukan beberapa ketidaksesuaian, di mana terdapat penerima bantuan yang bukan berasal dari usulan kami, sementara ada juga kasus dimana anak-anak usia sekolah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru terdaftar sebagai penerima manfaat jadi masyarakat mengeluhkan hal tersebut.

3. Apa saja langkah yang diambil agar kualitas hasil program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat terus meningkat?

Jawab : Agar kualitas hasil program kartu keluarga sejahtera terus meningkat langkah yang kami ambil setelah proses seleksi dan verifikasi adalah melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.

c. Waktu Pelaksanaan

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini berkisar 1 bulanan dek, tak jarang ada juga kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program ini diantara lain soal keterlambatan dalam penyaluran dana tadi dek.

2. Apakah terdapat masalah ketepatan waktu dalam pencairan bantuan pada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Ada dek, kan tak jarang bantuan itu tidak sesuai waktu pencairan nya kadang mau sampe 4 bulanan bantuan itu cair semua, itu semua bantuan sosial yad ek.

3. Apa yang dilakukan pemerintah desa jika terdapat masalah dalam waktu pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Yang dilakukan pihak desa jika terdapat masalah dalam waktu pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera bahwa pemerintah desa melakukan beberapa langkah untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera (KKS), antara lain dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengusulan dan penanganan KKS, serta meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan pihak terkait untuk mempercepat proses verifikasi dan distribusi kartu. Selain itu, pemerintah desa juga berupaya melakukan validasi data secara berkala untuk memastikan akurasi informasi yang digunakan dalam program ini.

d. Kepuasan Masyarakat

1. Apakah masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa puas dengan hadirnya program ini?

Jawab : Pastinya merasa puas karena bantuan dari Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sangat berarti bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki anak sekolah, orang tua, dan keluarga dengan anak disabilitas, Bagi keluarga yang memiliki anggota dengan disabilitas, bantuan ini menjadi lebih krusial.

2. Apa saja hal yang membuat masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa puas?

Jawab : Yang buat mereka merasa puas salah satu nya pelayanan yang kami berikan dalam melayani proses pendaftaran dan pendataan program kartu keluarga sejahtera ini.

3. Dan apa saja hal yang membuat masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa tidak puas?

Jawab : KPM merasa tidak puas dengan progam KKS. Salah satu alasan utama adalah ketidakpastian dan keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Jika KPM harus menunggu lama untuk menerima bantuan yang dijanjikan, hal ini dapat menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : Ammar Riswan
Status : Masyarakat
Umur : 25 tahun
Lokasi : Desa Pematang Setrak

a. Tingkat Pencapaian Sasaran

1. Apakah program kartu keluarga sejahtera dalam proses penyaluran dana sudah tepat dengan sasaran?

Jawab : Ya gitu dek masih ada yang belum tepat sasaran padahal dia yang sudah mampu soal financial masih mendapat kan bantuan sosial contoh nya program kartu keluarga sejahtera ini dek.

2. Apakah sejauh ini sasaran dalam penyaluran dana dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah ada yang tercapai?

Jawab : Sebagian besar sudah tapi seperti pertanyaan sebelum nya banyak yang masih kurang tepat sasaran dalam penyaluran dana kartu keluarga sejahtera ini.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses meningkatkan sasaran penyaluran dana pada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Kendalanya yang pertama Soal pengusulan nya agak sedikit ribet serta ketidakjelasan mengenai waktu pencairan bantuan. Terkadang, bantuan baru diterima setelah hampir tiga bulan tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga penerima merasa kesulitan dan mengalami masalah akibat penundaan tersebut.

b. Kualitas Hasil

1. Bagaimana kualitas hasil yang dirasakan setelah hadirnya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Kami sebagai masyarakat sangat terbantu dari hasil kualitas dari program ini, karena bantuan ini kami bisa membeli kebutuhan sekolah yang dimana penghasilan kami belum cukup untuk itu.

2. Sejauh ini apakah terdapat keluhan hasil dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Ada beberapa keluhan yang muncul terkait kualitas hasil dari program Kartu Keluarga Sejahtera. Beberapa di antaranya meliputi keterlambatan dalam pencairan dana, masalah penerima yang terdaftar namun tidak menerima bantuan, penyaluran yang belum tepat sasaran, serta proses verifikasi yang dianggap rumit. Kami, sebagai masyarakat, menyampaikan keluhan ini sebagai cerminan dari kualitas hasil program Kartu Keluarga Sejahtera.

3. Apa saja langkah yang diambil agar kualitas hasil program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat terus meningkat?

Jawab : Kami berharap pihak dinas dan desa dapat berupaya lebih keras dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk meningkatkan kualitas hasil program ini.

c. Proses Waktu Pelaksanaan

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Waktu yang dibutuhkan ya sekitar 1 bulanan dek itu pun mau telat juga

2. Apakah terdapat masalah ketepatan waktu dalam pencairan bantuan pada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Masalah ketepatan waktu dalam pencairan bantuan Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk proses verifikasi dan distribusi. Namun, informasi spesifik mengenai durasi dari narasumber masyarakat desa tidak tersedia dalam hasil pencarian.

3. Apa yang dilakukan pemerintah desa jika terdapat masalah dalam waktu pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Kadang pihak desa melakukan pemberitahuan dan sosialisasi terkait pencairan dana, mungkin itu sudah cukup sih untuk masyarakat

d. Kepuasan Masyarakat

1. Apakah masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa puas dengan hadirnya program ini?

Jawab : Ya saya cukup puas dengan hadirnya program ini karena bisa membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk anak sekolah.

2. Apa saja hal yang membuat masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa puas?

Jawab : Soal bantuan nya kami sudah cukup puas dan juga pelayanan dari desa yang membuat sosialisasi dan pemberitahuan jikalau ada keterlambatan dalam

pencairan dana. Kepala dusun dan petugas desa sabar ngejelasin syarat-syaratnya, terus ngasih tahu kapan kira-kira bantuannya cair.

3. Dan apa saja hal yang membuat masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa tidak puas?

Jawab : Penyaluran bantuan sering terjadi hambatan yang mengakibatkan terlambatnya dana bantuan sosial turun. Dana bantuan yang biasanya sebulan sekali, kini sering sekali per tiga bulan ketidaklancaran penyaluran ini terjadi karena masalah sistem yang ada di bank penyalur.

Pedoman Wawancara Informan

Nama : **Joko Putrawan**
Status : **Masyarakat**
Umur : **30 tahun**
Lokasi : **Desa Pematang Setrak**

a. Tingkat Pencapaian Sasaran

1. Apakah program kartu keluarga sejahtera dalam proses penyaluran dana sudah tepat dengan sasaran?

Jawab : Saya rasa masih ada yang beberapa belum tepat sasaran, karena masih ada masyarakat yang terdaftar tapi tidak kunjung mendapatkan bantuan padahal nama nya terdaftar.

2. Apakah sejauh ini sasaran dalam penyaluran dana dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah ada yang tercapai?

Jawab : kalau sudah ada atau belum, ya pasti sudah ada, karena saya sendiri juga merasa kurang mampu makanya dapat bantuan ini. Alhamdulillah ada manfaatnya. Dan menurut saya itu sudah jadi contoh kalau sasaran bantuan ini sudah ada yang tercapai.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses meningkatkan sasaran penyaluran dana pada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Yang dihadapi dalam proses pengusulan bantuan adalah kompleksitas prosedur yang cukup rumit dan membingungkan, di mana penerima harus melalui berbagai tahapan administrasi yang memerlukan pengumpulan dokumen dan informasi yang cukup banyak. Selain itu, terdapat ketidakjelasan

yang signifikan mengenai waktu pencairan bantuan, yang sering kali membuat penerima merasa cemas dan tidak pasti. Bantuan yang diharapkan baru diterima setelah hampir tiga bulan, tanpa adanya pemberitahuan atau informasi yang jelas mengenai status pengajuan mereka.

b. Kualitas Hasil

1. Bagaimana kualitas hasil yang dirasakan setelah hadirnya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Bermanfaat untuk masyarakat, dengan adanya program ini dek masyarakat sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari hari kami.

2. Sejauh ini apakah terdapat keluhan hasil dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Keterlambatan dalam pencairan dana, masalah penerima yang terdaftar namun tidak menerima bantuan, penyaluran yang belum tepat sasaran, serta proses verifikasi yang dianggap rumit. Kami sebagai masyarakat mengeluhkan hal tersebut.

3. Apa saja langkah yang diambil agar kualitas hasil program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat terus meningkat?

Jawab : . Kami berharap pihak dinas dan desa dapat berupaya lebih keras dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk meningkatkan kualitas hasil program ini.

c. Proses Waktu Pelaksanaan

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Kalau dalam hal pengusulan waktu nya 1 bulan, itupun belum langsung dapat kartunya dek, karena mungkin ada beberapa hal salah satunya mungkin karena berada dalam antrian kks.

2. Apakah terdapat masalah ketepatan waktu dalam pencairan bantuan pada program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : ketepatan waktu dalam proses pelaksanaan program ini masih kurang, karena masih banyak keterlambatan yang tidak bisa ditoleransi mau terkdang sampai 4 bulan baru semua pencairan dana bantuan baru keluar, itu pun masih ada yang terlambat.

3. Apa yang dilakukan pemerintah desa jika terdapat masalah dalam waktu pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?

Jawab : Ya mereka melakukan sosialisasi si dek untuk memberitahukan kepada masyarakat.

d. Kepuasan Masyarakat

1. Apakah masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa puas dengan hadirnya program ini?

Jawab : Saya sebagai masyarakat sangat puas dengan hadirnya program ini, karena membantu sekali untuk keluarga saya.

2. Apa saja hal yang membuat masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa puas?

Jawab : Yang membuat kami puas yang pertama bantuan nya yang kedua soal pelayanan dari desa yang cukup baik.

3. Dan apa saja hal yang membuat masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa tidak puas?

Jawab : penyaluran bantuan sering terjadi hambatan yang mengakibatkan terlambatnya dana bantuan sosial turun. Dana bantuan yang biasanya sebulan sekali, kini sering sekali per tiga bulan ketidaklancaran penyaluran ini terjadi karena masalah sistem yang ada di bank penyalur, selain itu pendaftaran verifikasi yang tergolong rumit membuat masyarakat bingung dengan mekanisme yang ada, sehingga masyarakat yang kurang mengetahui hal tersebut sering sekali ketinggalan informasi mengenai program tersebut. Hal ini menjadi alasan ketidak puasan masyarakat terhadap adanya program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Nomor : 701/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Lampiran : -

Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 16 Syawal 1446 H

15 April 2025 M

Kepada Yth : Kepala Desa Pematang Sertak

Kabupaten Serdang Bedagai

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama :

Nama mahasiswa	: ARIFANDI HIDAYAH TANJUNG
N P M	: 2103100047
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DI DESA PEMATANG SERTAK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN TELUK MENGKUDU
DESA PEMATANG SETRAK

Kode Pos : 20997

Nomor : 1848.3 /470 /06 / 2025
Hal : Pernyataan Selesai Penelitian

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
Di Tempat,

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor Surat 701/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2025 Pada tanggal 15 April 2025 perihal Izin Mengadakan Penelitian, maka kami menyatakan bahwa mahasiswa yang tertulis dibawah ini dinyatakan telah selesai melakukan penelitian di Kantor Desa Pematang Setrak Kabupaten Serdang Bedagai.

Nama : ARIFANDI HIDAYAT TANJUNG
NIM : 2103100047
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai"**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pematang Setrak, 24 April 2025

A.N. Kepala Desa Pematang Setrak
Sekretaris Desa





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam setiap surat yang diterbitkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/11/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fkip.umcu.ac.id> • fkip@umcu.ac.id • [umsumedan](https://www.umsumedan.com) • [umsumedan](https://www.umsumedan.com) • [umsumedan](https://www.umsumedan.com) • [umsumedan](https://www.umsumedan.com)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 12 November 2024

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Arifandi Hidayat Tanjung
 NPM : 2103100047
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 SKS diperoleh : 126 SKS, IP Kumulatif 3,65

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Fungsi Planning Pada Program Kartu keluarga sejahtera (KKK) Dalam Rangka <u>meningkatkan kesejahteraan</u> di Kabupaten Serdang Bedagai	<u>20/11/2024</u> <u>Arif</u>
2	Strategi Perencanaan Partisipatif dinas sosial dalam mengatasi Pekerja dibawah umur	
3	Efektivitas Fungsi organizing PPID dinas komunikasi dan informatika dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui <u>transparansi informasi</u> di kabupaten serdang bedagai	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 12 November 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

(Arifandi Hidayat Tanjung S.Sos.MSP)
 NIDN: 0122118801

Pemohon,

(Arifandi Hidayat T.)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Dr. Dedi Amrizal, S.Sos, M.Si)
 NIDN: 0110097201

039

pb: Dr. Dedi AMRIZAL M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2052/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 12 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ARIFANDI HIDAYAH TANJUNG**
 N P M : 2103100047
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DI DESA PEMATANG SERTAK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pembimbing : **Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 039.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 12 November 2025.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 13 Djumadil Awwal 1446 H
 15 November 2024 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.

Dekan,

Dr. ARIFIN SAEFI, S.Sos., MSP.
 NIDN 0030017402





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fislip.umsu.ac.id> ✉ fislip@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📧 umsumedan 📠 umsumedan 📧 umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 15 Januari 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aripandi Hidayah Tanjung
 N P M : 2103100047
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 20252./SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2024, tanggal dengan judul sebagai berikut :

Efektifitas Pungs Planning Pada Program Kartu Keluarga
 Sejahtera (KKS) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan
 di Kabupaten Sintang Bedagai.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua
 Program Studi

(Ananda Mahardika, S.Sos., M.P)
 NIDN: 0192118801

Menyetujui
 Pembimbing

(D. Dedu Anwar, S.Sos., M.Si)
 NIDN: 0110099201

Pemohon,

(Aripandi Hidayah Tanjung)





SK-4



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 150/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 17 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

No	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	JULIANA BR GINTING	2103100034	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PERAN DESA DALAM INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI DESA RAYAN
17	BOBY MARTIN NUSANTARA	2103100077	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	STRATEGI PLANNING DALAM PROGRAM PELATIHAN DAN PEMBINAAN UMKM PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
18	HANIFA PERMATA SARI	2103100076	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM PROGRAM PENINGKATAN PAD SEKTOR PAJAK DI KANTOR DINAS BAPENDA SERDANG BEDAGAI
19	ARIFANDI HIDAYAH TANJUNG	2103100047	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS FUNGSI PLANNING PADA PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
20	FARIZ FATURRAHMAN	2103100018	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	STRATEGI CONTROLLING KELOMPOK PKK DALAM MENJALANKAN PROGRAM DASHAT (DAPUR SEHAT ATASI STUNTING) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, 15 Rajab 1446 H
15 Januari 2025 M

(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.)

STARS
MOD
BRP-PT

hal : Permohonan Penggantian Judul Tugas Akhir
 Lampiran : 1 Lembar

Medan, 12 Maret 2025

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dengan hormat,

Bersama surat ini, saya bermaksud mengajukan permohonan revisi judul Skripsi yang telah diajukan sebelumnya.

Nama : Arifandi Hidayah Tanjung
 NPM : 2103100047
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Dosen Pembimbing : Dr. Dedi Amrizal S.sos., M.Si

Judul Skripsi yang sebelumnya diajukan:

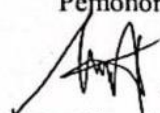
“Efektivitas Fungsi Planning Pada Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Rangka Penanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Serdang Bedagai “

Saya bermaksud merevisi judul menjadi:

“Efektivitas Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Desa Pematang Sertak Kabupaten Serdang Bedagai ”

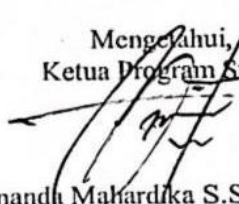
Adapun alasan revisi judul ini karena Pertama fokus ke 1 variabel “Efektivitas Program KKS” dikarenakan program KKS sudah menjelaskan dan dijalankan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Yang Kedua Pengelolaan KKS lebih kompleks dilakukan di desa

Demikian Surat permohonan ini saya ajukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Pemohon

 Arifandi Hidayah Tanjung
 (-----)

Pembimbing

 Dr. Dedi Amrizal S.sos., M.Si
 (-----)

Mengesahui,
 Ketua Program Studi

 Anand Mahardika S.Sos., M,SP
 (-----)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Gila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622409 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📱 uinsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

Sk-5

BERITA ACAKA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : Arifandi Hidayah Tanjung
NPM : 2103100064
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Efektifitas Program Kartu keluarga sejahtera (KKS) di Desa Pematang Selak Kabupaten Serdang Bedagai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	13/Jan/2025	Bimbingan Proposal Penelitian Bab I, II, III.	
2.	14/Jan/2025	Bimbingan Ganti judul Proposal penelitian	
3.	14/Jan/2025	Ace Proposal Penelitian	
4.	14/feb/2025	Bimbingan Revisi Proposal Penelitian	
5.	17/mar/2025	Bimbingan Draft wawancara	
6.	3/Apr/2025	Ace Draft wawancara	
7.	21/juni/2025	Bimbingan skripsi Tugas Akhir Bab IV dan Bab V.	
8.	25/juni/2025	Ace Skripsi Tugas Akhir	

Medan, 25 Juni 2025.

Ketua Program Studi,

Pembimbing,



Arifandi Hidayah Tanjung, S.Sos. M.Si, Arifandi Hidayah Tanjung, S.Sos. M.Si, Arifandi Hidayah Tanjung, S.Sos. M.Si
NIDN: 0122118801 NIDN: 0110017201



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
Nomor : 1113/UND/II.3.AU/UMSU-03/JF/2025

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 02 Juli 2025
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

Sk-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	MUHAMMAD QODRI	2103100036	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI STAFFING DALAM PELAKSANAAN MUTASI KARYAWAN DI KANTOR REGIONAL I KEBUN SEI PUTIH (PTPN IV) KABUPATEN DELI SERDANG
2	BOBY MARTIN NUSANTARA	2103100077	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	STRATEGI PLANNING DALAM PROGRAM PELATIHAN DAN PEMBINAAN UMKM PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) KABUPATEN DELI SERDANG
3	DEONA AGNESIA POHAN	2103100064	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (E-PUBLIC) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4	RIA DAMIA NABILA	2103100029	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH., MM	STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG MANDOR I DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN AFDELING III PT. BAS DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
5	PUTRI YANA BATUBARA	2103100006	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IDA MARTINELLY, SH., MM	FUNGSI PLANNING DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KANTOR DISDUKCAPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Notulis Sidang :

1.

Tahap Tripartisan oleh :

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Wakil Rektor

Medan, 05 Muharram 1447 H
30 Juni 2025M

Panitia Juri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sekretaris

Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom

Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom

Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom

Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom

Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom

Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom

Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Staf Kantor Desa Pematang Setrak
Kabupaten Serdang Bedagai**



**Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Pematang Setrak
Kabupaten Serdang Bedagai**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Arifandi Hidayah Tanjung
 Tempat & Tanggal Lahir : Kota Sibolga, 14 Oktober 2003
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Kota Sibolga, Kec. Sibolga Sambas, Jl. Mahoni
 Anak ke : 1 dari 2 bersaudara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Basramon Tanjung S.Sos
 Nama Ibu : Relingsih Triniawita Rambe S. Pd.SD
 Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri SipSil
 Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Kota Sibolga, Kec. Sibolga Sambas, Jl. Mahoni

Pendidikan Formal

2009 – 2015 : SD NEGERI 081228 SIBOLGA
 2015 – 2018 : SMP NEGERI 1 SIBOLGA
 2018 – 2021 : SMA NEGERI 3 SIBOLGA
 2021 – 2025 : S1 Ilmu Administrasi Publik, UMSU